

ABSTRAKSI

Dasar adanya Proyek Jalan Bandara Internasional Di Kabupaten Lombok Barat adalah terbitnya SK. Bupati Lombok Barat 2134 A/28/Adm.Pem/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Lombok Barat yang menyebutkan bahwa Ketua Tim Pengadaan Tanah dipegang oleh Sekda Kabupaten Lombok Barat. Pemberian ganti rugi tanah yang terkena proyek tersebut juga mengalami hal yang menyimpang dari ketentuan yaitu nilai jual yang melampaui NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dan dibayar sebelum pembebasan dilakukan. Proses pembayaran tersebut ada beberapa kejanggalan sehingga timbul gugatan perdata di Pengadilan serta masih ditemuinya sengketa yang seharusnya penyelesaian pembayaran dititipkan melalui Pengadilan Negeri tetapi ini tidak dilakukan.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa pembangunan proyek jalan Bandara Internasional di Kabupaten Lombok Barat termasuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 65 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 36 Tahun 2005. Sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka pengadaan tanahnya dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang pembayaran ganti kerugiannya didasarkan atas musyawarah, yang berarti menghormati hak atas tanah dan pemegang haknya.

Cara penetapan ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar yaitu pemegang hak atas tanah berpedoman pada harga pasar tanah, sedangkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota berpedoman pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Besarnya ganti rugi yang ditawarkan oleh instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dinilai terlalu rendah dan tidak layak. Akibat hukum pelepasan hak milik atas tanah akan hapus dan kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh negara dan pihak yang membutuhkan tanah untuk kepentingan umum tersebut mengajukan permohonan hak.

Kata kunci : Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Proyek Pembangunan Jalan Bandara Internasional

ABSTRACT

The basis of International Airport Road Project in West Lombok Regency is the publication of Decree No. 2134 Regent West Lombok A/28/Adm.Pem/2009 dated 30 November 2009 on the establishment of the Land Procurement Committee in West Lombok district stating that the Procurement Team Leader Land held by the District Secretary West Lombok. Indemnity lands affected by the project also experienced that deviate from the provisions of the sale value exceeding NJOP (Tax Object Sale Value) and paid prior to the release done. The payment process there are some discrepancies that arise in a civil lawsuit and the Court still met the dispute settlement payments should be deposited with the District Court but this was not done.

The results of the discussion in this study is the international airport road construction project in West Lombok district includes the procurement of land for public purposes in accordance with the provisions of Article 5 of Presidential Decree No. 65 of 2006 as amended by Presidential Regulation. 36 of 2005. As the procurement of land for public use, then the provision of land is done through the establishment of the District Land Procurement Committee / City the settlement payments based on consensus, which means respect for land rights and rights holders.

Way of determination of compensation for land acquisition has been carried out in accordance with proper procedures that holders of land rights based on market price of land, while the Land Acquisition Committee of the District / City based on the Tax Object Sale Value (NJOP) The amount of compensation offered by Government agencies which requires the land is considered too low and not worth it. Due to release legal rights to land will be removed and returned to the land controlled by the state and party membutuhkan the land for public use rights apply.

Key words: Land Acquisition, Public Interest, International Airport Road Construction Project